

Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan

Lusi Fiartini¹, Alisman²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 26 Juli 2023
Revised: 28 Juli 2023
Accepted: 29 Juli 2023

KEYWORDS

Service Quality, Regional Revenue Expenditure Budget And Poverty

CORRESPONDENCE

E-mail: lusifiartini@gmail.com

ABSTRACT

South Aceh Regency has 18 scattered sub-districts, and the distribution of the sub-district population is uneven so that it has an impact on differences in the population's economy between Tapak Tuan City and other sub-districts. It is inevitable that poverty will still hit this district, according to data from the Central Statistics Agency (BPS) the poverty rate for South Aceh Regency will reach 32.700 in 2022. To help the less fortunate, the government has made efforts to provide assistance sourced from the regional expenditure revenue budget.

This research was made to find out and explain the extent of the influence of regional expenditure budgets on poverty alleviation in South Aceh district. This research was conducted from January to May 2023, using the Simple Linear Regression statistical data analysis method to make it easier for researchers to get the desired results. data brought by this researcher from the Central Statistics Agency (BPS) of South Aceh Regency. The regression coefficient obtained is $4.468E-6$ with a significant value of $0.259 > 0.05$ where it is shown that the coefficient is positive, so what is obtained is that there is a close relationship between the regional expenditure budget and poverty, where if the APBD budget has increased then there is also an increase in poverty. From the results of R square, it is found that 77.3% of this can be used to see the magnitude of the influence. From the calculated t value of 3.197%, which means it is in the receiving area of H_a . F value count 10.220.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu *problem* yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Selatan. Dimana hal tersebut dapat dilihat pada website Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Selatan. jumlah penduduk miskin sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ada yg sebagian menyebabkan rendahnya tingkat kemiskinan. Dari data Badan Pusat Statistik 2018 sebesar 33.820, pada tahun 2019 sebesar 32.060 dan 2020 jumlah penduduk miskin 34.900, di tahun 2021 sebanyak 33.250, namun pada tahun 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan sebanyak 32.700 dari 4 tahun sebelumnya.

Kenaikan atau penurunan presentase penduduk miskin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; kurang besarnya belanja daerah atau APBD dibandingkan dengan kebutuhan belanja, ketidak tepatan sasaran yang digunakan subsidi di lapangan, atau bisa disebabkan pandemi COVID-19. Karena masalah tersebut tidak segera ditangani, akan menyebabkan presentasenya semakin bertambah dari sebelumnya.

Kabupaten Aceh Selatan memiliki 18 kecamatan yang tersebar dan jumlah penduduk di kecamatan-kecamatan tersebut tidak akurat, sehingga berdampak pada perbedaan jumlah penduduk yang ada antara Kota Tapak Tuan dengan kecamatan lainnya. Tidak dapat dipungkiri kemiskinan akan terus turun di wilayah ini yaitu 12,43% pada tahun 2022. Untuk membantu masyarakat kurang mampu, pemerintah telah melakukan upaya pemberian bantuan melalui APBD.

Dalam konteks ini, (APBD) mempunyai peran penting untuk alat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi disparitas antar daerah, dan mengatasi kemiskinan. Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen

utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan belanja daerah meliputi Belanja Pembangunan. Perbedaan dalam sumber pendapatan dan alokasi belanja antara daerah satu dengan yang lainnya dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketimpangan antar daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan dari kegiatan ekonomi di daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil usaha milik daerah. PAD dapat memberikan keuntungan bagi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan program-program lainnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. DAU memiliki peran penting dalam mengurangi disparitas antar daerah karena daerah yang memiliki pendapatan asli yang rendah akan mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah pusat melalui DAU. Hal ini dapat membantu daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan tertentu, seperti pengembangan infrastruktur atau penanggulangan kemiskinan. DAK bertujuan memberikan solusi khusus daerah tersebut dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan.

Dengan adanya APBD yang mencakup PAD, DAU, dan DAK, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimilikinya untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sektor-sektor ekonomi yang potensial, serta program-program penanggulangan kemiskinan. Melalui pengelolaan yang baik, APBD dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi disparitas antar daerah, dan mengatasi masalah kemiskinan di tingkat lokal.

Belanja Pembangunan mencakup pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mengalokasikan dana secara efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, memperluas akses terhadap layanan publik, dan menciptakan lapangan kerja baru, hingga nantinya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penggunaan APBD yang tepat juga dapat membantu mengurangi disparitas antara daerah yang memiliki tingkat pendapatan yang berbeda. Melalui alokasi yang proporsional dan berdasarkan kebutuhan, daerah yang miskin atau terbelakang dapat menerima dana yang lebih besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Dengan demikian, APBD memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi disparitas antar daerah, serta mengatasi kemiskinan. Namun, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan yang baik, pengelolaan yang transparan, dan evaluasi yang terus-menerus terhadap pelaksanaan APBD guna mencapai tujuan tersebut. Dalam hal operasional daerah dan APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah pada anggaran 1 Januari hingga 31 Desember. Pendanaan untuk infrastruktur publik terkait langsung dengan jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan fasilitas publik. Semakin tinggi jumlah pengeluaran publik untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, semakin banyak uang yang dihabiskan untuk pembangunan, semakin baik layanan dan infrastruktur publik (Fatimah dan Hasbullah, 2020). Kemiskinan merupakan masalah sosial terkait dengan tingkat perlindungan sosial dan upaya penanggulangannya. Dalam Panduan Keluarga (1996:10), kemiskinan adalah kondisi masyarakat tidak dapat menghidupi diri sendiri dalam cara hidupnya serta tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan tenaga, pikiran dan tubuhnya. Dalam pedoman IDT (1993:26), kemiskinan adalah kondisi ketimpangan absolut yang muncul bukan karena orang miskin menginginkannya, tetapi karena tidak dapat dihindari dan kekuatan-kekuatan yang ada di dalamnya.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Bastian (2006), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disahkan melalui peraturan daerah. APBD berperan sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah selama periode satu tahun, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.

APBD merupakan biaya tahunan yang dipertimbangkan dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), sejalan dengan peraturan daerah (sebagai contoh, Permendagri no. 13 Tahun 2006 yang diperbarui menjadi Permendagri no. 59 Tahun 2007). Definisi APBD menurut Pasal 1 ayat (8) UU Keuangan Negara adalah APBD tahunan yang disahkan oleh DPRD. APBD merupakan rencana kerja pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk mencapai tujuan pembangunan dalam satu tahun, yang diungkapkan dalam bentuk angka uang dan disetujui oleh DPRD serta diatur oleh peraturan perundang-undangan yang disebut peraturan daerah.

Pada dasarnya, peran dan tujuan APBD mirip dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), namun implementasinya berbeda. APBN berlaku di tingkat negara sementara APBD terbatas pada tingkat daerah dan dilaksanakan oleh pimpinan daerah atau gubernur, pemerintah daerah, dan kepala daerah, yang sesuai dengan kebijakan otonomi daerah (Badrudin, 2012: 97).

Peran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Layanan Resmi: APBD digunakan sebagai dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. Ini berarti APBD menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan resmi pemerintah daerah.
2. Pengorganisasian Pekerjaan: APBD berperan sebagai pedoman untuk pengelolaan dan perencanaan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun. APBD membantu mengarahkan alokasi sumber daya dan menetapkan prioritas dalam pelaksanaan program dan proyek daerah.
3. Layanan Pemantauan: APBD digunakan sebagai acuan untuk memantau apakah kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan.
4. Penugasan Pekerjaan: Perencanaan APBD harus bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta menghindari pemborosan sumber daya. Selain itu, APBD juga harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
5. Layanan Distribusi: APBD perlu memperhatikan prinsip pemerataan dan kepemilikan dalam alokasi anggaran. Hal ini berarti APBD harus memperhatikan kebutuhan masyarakat secara merata dan memperhatikan aspek keadilan dalam distribusi sumber daya.
6. Pekerjaan Stabilitas: APBD berperan sebagai alat untuk memelihara dan menciptakan keseimbangan yang diperlukan dalam perekonomian daerah. APBD harus mencerminkan stabilitas ekonomi serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam daerah tersebut.

Fungsi-fungsi tersebut menggambarkan peran dan tujuan APBD dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di tingkat daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 memberikan panduan tentang penggunaan APBD dalam konteks tersebut.

Tujuan pembuatan APBD

Tujuan utama APBN adalah untuk memimpin proyek-proyek pembangunan dan implementasi di daerah. Harapannya adalah peningkatan produktivitas, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Selain tujuan di atas, terdapat tujuan lain dari proyek APBD, yaitu:

1. Membantu otoritas lokal dalam melakukan kebijakan fiskal.
2. Dapatkan pendapatan dan performa.
3. Membuat prioritas belanja daerah untuk tahun ini. Menjadi bentuk kesepahaman dan pertanggungjawaban antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat. Pengeluaran pemerintah

Terdapat beberapa studi lain yang berkaitan dengan belanja pemerintah daerah atau APBD dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Abdul Halim (2008:15), APBD merupakan anggaran daerah yang melibatkan beberapa aspek, antara lain:

1. Rencana bisnis daerah yang disertai dengan informasi rinci.
2. Sumber pendapatan yang memiliki tujuan minimal untuk menutupi biaya terkait dengan kegiatan tersebut.
3. Biaya yang merupakan jumlah maksimum yang akan dikeluarkan untuk jenis pekerjaan tertentu. Hal ini harus disajikan sebagai kerangka waktu yang dianggarkan, biasanya dalam periode satu tahun.

Yao (2007, 13) arti kemiskinan adalah konsep multifaset. Dilihat dari berbagai segi, seperti kekurangan uang, pangan, perumahan, kesempatan kerja, berdasarkan pada aset fisik seperti ternak dan tanah. Penyebab kemiskinan meliputi rendahnya pendidikan, pengangguran, pertumbuhan penduduk, dan *problem* lainnya yang berdampak bagi pembangunan

Kotze dan Hikmat (2004:6) bahwa sumber daya sebaiknya digunakan oleh masyarakat miskin. Sumber daya tersebut paling efektif jika dimanfaatkan oleh orang-orang miskin karena mereka akan mendapat manfaat dari dukungan orang lain. Namun, penggunaan uang yang tidak tepat dapat menghambat perkembangan masyarakat, sehingga mereka sering mengalami isolasi dari masyarakat. Hal ini seringkali menyebabkan kemiskinan yang semakin parah, di mana masyarakat terjebak dalam kondisi yang pasif.

Menurut Supriatna (2011), kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang terbatas dalam pikiran dan tindakannya. Tingkat pendidikan seseorang memiliki pengaruh terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan. Kemiskinan memiliki banyak penyebab, baik faktor buku maupun faktor non-buku, dan hal ini berdampak besar pada dunia pendidikan formal.

Indikator kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks karena terkait dengan kebutuhan ekonomi. Selain itu, kemiskinan juga melibatkan aspek-aspek lain di luar ekonomi. Secara umum, kemiskinan mengacu pada keadaan pribadinya tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi primer seperti pangan, tempat tinggal, sandang, pendidikan, dan kesehatan (Nanga, 2006: 36).

BPS (Badan Pusat Statistik) adalah pihak pertama yang mempublikasikan data mengenai kemiskinan. Pada tahun 1984, BPS menerbitkan buku pertama tentang kemiskinan yang mencakup periode 1976-1981. BPS kemudian mulai menghitung persentase penduduk miskin setiap tiga tahun. Istilah "penduduk miskin" digunakan untuk merujuk di bawah garis kebutuhan pokok.

Pangan dan gizi juga menjadi faktor penting dalam mengukur kemiskinan. Misalnya, dalam Widyakarya tahun 1978, dikemukakan bahwa seseorang dianggap hidup dengan baik contohnya dapat memenuhi 2100 kalori per hari. Dalam konteks ini, tingkat kemiskinan sangat terkait dengan nilai mata uang, karena seseorang dianggap dapat menghidupi dirinya sendiri jika dapat memperoleh 2100 kalori per hari.

Demikianlah, kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks yang melibatkan aspek ekonomi dan faktor-faktor lainnya seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Pengukuran kemiskinan juga terkait erat dengan nilai mata uang dan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Penyebab kemiskinan

Menurut Soebagiyo (2013), terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan tingkat kemiskinan:

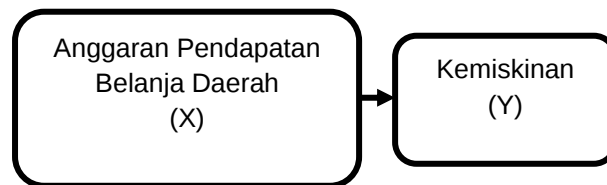
1. Penyebab individu: Tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh tindakan atau pilihan individu yang mengalami kemiskinan. Misalnya, kurangnya keterampilan atau pendidikan yang memadai, kurangnya akses ke pekerjaan yang layak, atau keputusan individu yang berdampak negatif pada kondisi keuangan mereka.
2. Faktor keluarga: Kemiskinan juga erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang diberikan kepada keluarga. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menghambat akses ke pekerjaan yang lebih baik dan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Penyebab subkultur (subkultur): Subkultur atau budaya lokal dapat mempengaruhi perilaku sehari-hari masyarakat dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, norma sosial tertentu atau kebiasaan yang menghambat mobilitas sosial atau pengembangan usaha.
4. Penyebab perusahaan: Faktor-faktor yang terkait dengan perusahaan dapat menyebabkan tingkat kemiskinan. Misalnya, perang, krisis ekonomi, atau tindakan pemerintah yang berdampak negatif pada lapangan kerja atau stabilitas ekonomi.

Penyebab struktural: Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya, ketimpangan ekonomi, diskriminasi sosial, atau ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang.

Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Penting untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor ini secara holistik untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka Konseptual

Theory of mind atau biasa disebut dengan proses berpikir digunakan dalam penelitian untuk pemecahan masalah. Proses ini menggunakan metode ilmiah yang ditampilkan dalam proses refleksi ini, atau hubungan antara variabel atau efek dalam penelitian. Diagram kerangka konseptual terkait tergambar di bawah ini.



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Untuk mengukur pengaruh anggaran pendapatan belanja daerah terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan, dapat menggunakan analisis regresi sederhana. Regresi linier sederhana ialah metode statistik yang memungkinkan Anda menganalisis hubungan antara dua variabel. Dalam hal ini, variabel independen adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (X), dan variabel dependen adalah tingkat kemiskinan (Y).

Berikut adalah tahapan dalam melakukan analisis regresi sederhana:

1. Pengumpulan data: Kumpulkan data terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan. Data ini dapat diperoleh dari kantor keuangan dan sumber data terpercaya lainnya.
2. Penyiapan data: Susun data yang telah dikumpulkan ke dalam format yang sesuai untuk analisis regresi. Pastikan variabel independen (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan variabel dependen (tingkat kemiskinan) tercatat dengan benar.
3. Analisis regresi sederhana: Gunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau Microsoft Excel untuk melakukan analisis regresi sederhana. Anda akan memasukkan variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) ke dalam model regresi.
4. Interpretasi hasil: Setelah analisis selesai, perhatikan hasil yang diperoleh. Fokus pada koefisien regresi (slope) yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara anggaran pendapatan belanja daerah dan tingkat kemiskinan. Jika koefisien regresi positif dan signifikan, itu menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendapatan belanja daerah berhubungan dengan pengurangan tingkat kemiskinan.

Penting untuk dicatat bahwa analisis regresi sederhana tidak dapat secara langsung menunjukkan hubungan sebab-akibat antara anggaran pendapatan belanja daerah dan pengentasan kemiskinan. Namun, dapat memberikan gambaran tentang hubungan statistik antara kedua variabel tersebut. Pastikan untuk melakukan interpretasi hasil dengan hati-hati dan melihat konteks serta faktor lain yang mungkin memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan.

$$Y = a + bX \quad Y_i = a + bX_i + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen atau terkait (Variabel Responden atau Variabel Akibat).

Y_i = Kemiskinan (Jumlah penduduk Miskin dalam ribuan jiwa).

a = Konstanta (Taksiran Penduduk miskin tetap setiap tahunnya).

b = nilai Koefisien regresi (kemiringan) jumlah penduduk miskin akibat perubahan dana alokasi umum.

X_1 = Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Dalam Rupiah)

e = Kesalahan Penaksiran (error term).

I = Periode Observasi 2018-2022

Uji koefisien determinasi (R-squared) digunakan untuk mengukur sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen menggunakan variabel independen. Nilai R-squared berkisar antara 0 hingga 1, dan semakin tinggi nilai R-squared, semakin baik model dalam menjelaskan variasi dalam data. Dalam konteks analisis regresi sederhana yang Anda lakukan, uji koefisien determinasi dapat memberikan informasi tentang seberapa baik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (variabel independen) menjelaskan variasi dalam tingkat kemiskinan (variabel dependen) di Kabupaten Aceh Selatan.

Nilai R-squared yang dimodifikasi menggambarkan persentase variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Semakin tinggi nilai R-squared, semakin besar kontribusi variabel independen terhadap variasi dalam variabel dependen. Untuk melakukan uji koefisien determinasi (R-squared) dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, Anda perlu menjalankan analisis regresi sederhana terlebih dahulu. Hasil analisis akan menyertakan nilai R-squared yang dimodifikasi.

Penting untuk diingat bahwa R-squared tidak memberikan informasi tentang sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai R-squared hanya memberikan gambaran tentang sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variasi dalam data. Sebagai tambahan, penting juga untuk mempertimbangkan interpretasi hasil secara holistik dan melihat faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan data besar anggaran pendapatan belanja daerah pertahun di kab. aceh sealatan. Dalam priode 5 (lima) 2018-2022:

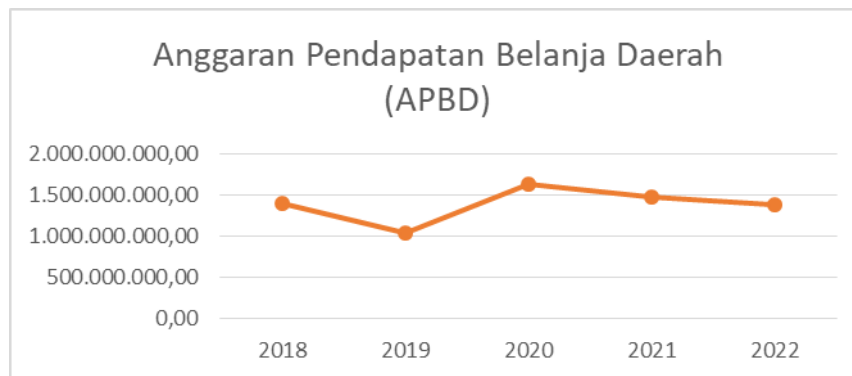
Tabel 1. besarnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2018-2022

Tahun	Anggaran pendapatan belanja daerah (Milyar)
2018	1.396.405.910,00
2019	1.048.619.220,00
2020	1.634.758.370,00
2021	1.475.310.630,00
2022	1.384.569.400,00

Sumber badan pusat statistik (BPS) kabupaten aceh selatan

Diatas dapat kita lihat besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang di terima Pada Kabupaten Aceh Selatan dari 5 tahun sebelumnya sebagai berikut : di tahun 2018 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di terima berjumlah Rp 13.96.405.910,00, di tahun 2019 terjadi penurunan berjumlah Rp 1.048.619.200,00, di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.634.758.370 di tahun 2021 mengalami penurunan berjumlah Rp 1.475.310.630,00, dan di tahun 2022 mengalami penuruna lagi sebesar Rp 1.384.569.400,00

Dari semua data yang di peroleh dan dijabarkan sehingga dapat kita lihat bahwa jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Selatan dengan jumlah terbesar pada tahun 2020 Rp 1.634.758.370,00. Pada tahun 2020 jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah jumlah terbesar di bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dari tabel 1 di atas disajikan dalam bentuk grafik dan dapat diperlihatkan perbedaan data jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang sudah diterima pada 2018 - 2022 dengan priode 5 (lima) tahun.



Grafik 1. Besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Selatan

Pada Grafik di atas dapat kita lihat secara jelas peningkatan dan penurunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diterima oleh Kabupaten Aceh Selatan periode 5 tahun mulai dari 2018-2022. Dari grafik di atas titik tertinggi yaitu di tahun 2020, dan titik terendah diterima di tahun sebelumnya yaitu 2019.

Kedudukan Kemiskinan

Data jumlah penduduk miskin dan kemiskinan yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten aceh selatan selama 5 tahun yaitu 2018-2022 dapat dilihat di tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Selatan

Tahun	Jumlah penduduk miskin ribu (jiwa)	Perkembangannya (%)
2018	33.820	14,01
2019	32.050	13,09
2020	34.910	15,87
2021	33.250	13,18
2022	32.700	12,43

Sumber : Badan pusat statistik (BPS) kabupaten aceh selatan

Berdasarkan informasi yang Anda berikan, dapat dilihat bahwa dalam rentang waktu 2018-2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Selatan mengalami fluktuasi. Berikut adalah ringkasan perubahan jumlah penduduk miskin selama periode tersebut:

- Tahun 2018: Jumlah penduduk miskin adalah 33.820 jiwa.
- Tahun 2019: Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 32.060 jiwa.
- Tahun 2020: Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 34.910 jiwa.
- Tahun 2021: Terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 33.250 jiwa.
- Tahun 2022: Jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan sekitar 32.780 jiwa.

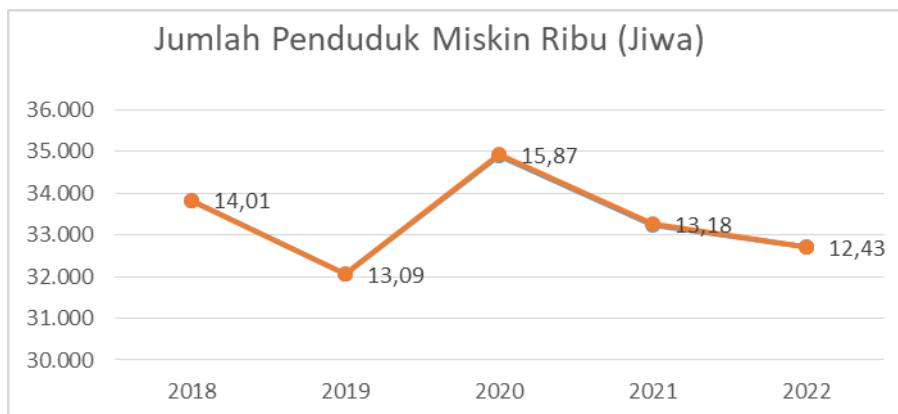
Perubahan jumlah penduduk miskin ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan selama periode tersebut. Berdasarkan deskripsi, berikut adalah perubahan presentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2018 hingga 2022:

- Tahun 2018: Peningkatan penduduk miskin sebesar 14,01%.
- Tahun 2019: Penurunan penduduk miskin sebesar 13,09%.
- Tahun 2020: Penurunan penduduk miskin sebesar 12,87%.
- Tahun 2021: Kenaikan penduduk miskin sebesar 13,18%.
- Tahun 2022: Penurunan penduduk miskin sebesar 12,43%.

Informasi ini menunjukkan fluktuasi angka penduduk miskin di Kabupaten Aceh Selatan selama periode tersebut. Penurunan persentase penduduk miskin menandakan kemajuan dalam mengurangi tingkat

kemiskinan, sementara kenaikan persentase penduduk miskin dapat menunjukkan adanya faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan di daerah tersebut.

Untuk melihat lebih jelas kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat dari grafik 2 yaitu sebagai berikut



Grafik 2. Jumlah Penduduk Miskin kabupaten aceh selatan

Pada grafik di atas menunjukkan perubahan jumlah penduduk miskin dari Kabupaten Aceh Selatan pada periode yang ditentukan yaitu 2018-2022, dapat kita lihat bahwa kenaikan dan turunya jumlah angka kemiskinan Kabupaten Aceh Selatan. Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terbesar dari tahun 2020 dan angka penduduk miskin terendah yaitu dari tahun 2022.

Keterkaitan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Untuk melihat kaitan antara APBD terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan merupakan dari data yang diperoleh Badan Pusat Statistika Kabupaten Aceh Selatan dapat menggunakan pengujian regresi linier pakai aplikasi SPSS diperoleh data yang dapat kita lihat dari tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.879 ^a	.773	.697	599.140

Predictors: (Constant), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Data pada tabel, bahwa nilai korelasi (R) antara variabel anggaran APBD dan kemiskinan 0,879. Ini adanya hubungan positif yang kuat kedua variabel tersebut. Selanjutnya, determinasi (R Square) memiliki nilai sebesar 0,773. Nilai sekitar 77,3%, variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi dalam anggaran APBD. Sisa variabilitas, sekitar 22,7%. Dengan demikian, anggaran APBD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan dapat menjelaskan sekitar 77,3% variasi dalam kemiskinan yang diamati. Sisa variabilitas tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel anggaran APBD yang tidak tercakup dalam analisis ini.

Tabel 4. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3668815.177	1	3668815.177	10.220	.049 ^b
Residual	1076904.823	3	358968.274		
Total	4745720.000	4			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan informasi yang Anda berikan dari tabel tersebut, nilai F hitung yang diperoleh adalah 10,220. Dengan menggunakan $df_1=1$ dan $df_2=3$, serta taraf signifikansi mendekati 0,49, nilai F tabel yang diperoleh adalah 1,069.

Dalam analisis tersebut, karena F hitung (10,220) lebih besar dari F tabel (1,069), disimpulkan variabel (APBD) berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan. Dengan kata lain, anggaran APBD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penting untuk dicatat bahwa keputusan ini didasarkan pada pengujian hipotesis dan penggunaan taraf signifikansi tertentu. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan konteks, metode analisis yang digunakan, dan asumsi yang mendasari interpretasi tersebut.

Tabel 5. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27142.616	1958.204		13.861	.001
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	4.468E-6	.000	.879	3.197	.049

Dari tabel yang diberikan, nilai konstanta (a) pada persamaan regresi adalah 27142,616, dan nilai koefisien Anggaran APBD (b) adalah 4,468E-6. Dengan menggunakan persamaan regresi $Y = a + bx$, dapat ditulis sebagai berikut: $Y = 27142,616 + 4,468E-6x$. Interpretasi nilai tersebut adalah sebagai berikut: nilai konstanta (27142,616) menunjukkan nilai Y (variabel dependen) ketika nilai x (variabel independen, yaitu Anggaran APBD) adalah 0. Dalam konteks ini, nilai konstanta tersebut menunjukkan pengaruh positif pada variabel independen (Anggaran APBD).

Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi nilai koefisien dan persamaan regresi ini harus dilihat dalam konteks analisis yang dilakukan, termasuk asumsi dan metode yang digunakan. Selain itu, interpretasi yang lebih lengkap dapat dilakukan dengan mempertimbangkan koefisien lainnya, uji signifikansi, dan analisis statistik lainnya yang relevan dalam model regresi.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

1. Koefisien regresi yang diperoleh adalah 4,468E-6 dengan signifikansi 0,259 ($>0,05$). Sehingga disimpulkan koefisien memiliki nilai positif. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara anggaran pendapatan belanja daerah dan kemiskinan. Ketika anggaran APBD meningkat, kemiskinan cenderung meningkat juga.
2. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Selatan dipengaruhi besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, hal ini dilihat dari nilai R^2 square sebesar 77,3%.
3. Nilai t hitung diperoleh adalah 3,197. Hal ini mengindikasikan penerimaan pada daerah H_a .

Saran

Kenaikan atau penurunan presentase penduduk miskin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; kurang besarnya belanja daerah atau APBD dibandingkan dengan kebutuhan belanja, ketidak tepatan sasaran yang digunakan subsidi di lapangan, atau bisa disebabkan pandemi COVID-19. Karena masalah tersebut tidak segera ditangani, akan menyebabkan presentasenya semakin bertambah dari sebelumnya.

Dengan demikian saran yang bisa penulis berikan bahwasanya anggaran pendapatan belanja daerah harus lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan, karena agar tingkat kemiskinan di kabupaten aceh selatan bisa mengalami penurunan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan ridhoNya. Serta berbagai pihak yang telah membantu baik orang tua, saudara-saudara, dan teman-teman sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Dosen pembimbing penulis yang senantiasa mengarahkan penulis hingga sampai selesai dan juga dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Teuku Umar Fakultas Ekonomi.

REFERENSI

- Yao, Guevera Assamoi. (2007). Fiscal Decentralization and Poverty Reduction Outcomes: Theory and Evidence. Economics Dissertations Georgia:Georgia State University
- Alisman, A, & sufriadi, di (2020). Pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi diwilaya barat selatan provinsi aceh priode tahun 2011-2019. Jurnal, EMT KTTA, 4(2),71-79
- Alisman, A., sufriadi, D., dan fandi, D. Y (2022). Efektivitas pengelolaan dana APBG (studi khusus di kampung uteun pulo kecamatan seunangan timur kabupaten nagan raya) jurnal pendidikan dan konseling (JPDK), 4 (2). 68-75.
- Daling, Marchelina. Analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten mina hasa tenggara. Jurnal EMBA = jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akutansi. 2023, 1.3.
- Larengkum, D, Masi Nambaw, V. & tolosan, K. (2015). Pengaruh anggran pendapatan belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto di kabupaten kepulauan talaud. Jurnal berkala ilmia efesiensi, 15 (01)
- Ghozali, imam. (2005) aplikasi analisis multi variante dengan SPSS. Semarang. Badan penerbit UNDIPT.
- Nugrohol, R. I. Y, & isnaini, S. J. I.J (2020) Analisis diterminan kemiskinan dijava timur tahun 2018. Jurnal grof, ekonomi, 11 (2) 176-187
- Salam, A. 2015. Pengaruh APBD. PDRB & Anggka pengangguran terhadap angka kemiskinan dimadura.
- Sinambela, elizar, ct al. Analisis kinerja angran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah provensi sumatra utara. Jurnal riset akutansi dan bisnis, 2016, 16.1.
- Soebagio, daruwono 2013 perekonomian indonesia sukarta = fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah surakarta